

Effect of Socialization of Government Internal Control System (SPIP) on the understanding and application in Health Polytechnic of Semarang

Sosialisasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pengaruh pada pemahaman dan penerapan di Politeknik Kesehatan Semarang

Soesanto
Tri Wiji Lestari
Ardi Soesilo Wibowo

*Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang
Jl. Wolter Monginsidi 115 Semarang*

Abstract

Government Internal Control System (SPIP) is a process that is integrated into the actions and activities carried out continuously by managers and all employees for achieving agency's objectives through good governance, including effective and efficient, the reliability of financial reporting, safeguarding state assets, and obedience against legislation. Managers and employees in the departments and representatives of Health Polytechnic of Semarang need to understand and apply the SPIP in creating good governance. Quantitative research with quasi-experimental methods was used in this study. Sample was 51 managers and employees of the departments and representatives Health Polytechnic of Semarang. All gathered in a room and took a pre-test questionnaire about understanding and applying the elements of socialization SPIP. Socialization of SPIP was then provided. A post-test questionnaire similar to the pre-test with SPIP was taken by the participants in an interval of one month. Data processing was done with the editing, coding, data entry and tabulation of data. Univariate and bivariate analysis as well as Wilcoxon matched pairs test were used to analyze the data. The results showed that understanding of the elements and application of SPIP increased after the socialization. There is a before and after effect of socialization with SPIP application in Health Polytechnic of Semarang. As a suggestion, we need to make the application of SPIP and commitment of managers, employees, and representatives of Health Polytechnic of Semarang in order to create good governance.

Key words: SPIP, managers and employees, Health Polytechnic of Semarang

Abstrak

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh manajemen dan seluruh karyawan untuk memberikan keyakinan memadai untuk mencapai tujuan lembaga melalui efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap undang-undang yang akan menciptakan good governance (pemerintahan yang baik). Manajer dan karyawan di departemen dan perwakilan Politeknik Kesehatan Semarang perlu memahami dan menerapkan SPIP dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik. Penelitian kuantitatif dengan metode eksperimental semu. Samples berjumlah 51 orang manajer dan karyawan Departemen dan perwakilan Politeknik Kesehatan Semarang berkumpul di sebuah ruangan dan diberi kuesioner pre-test tentang pemahaman dan penerapan unsur-unsur sosialisasi SPIP sehingga dengan interval waktu SPIP dari 1 bulan dan kemudian melakukan kuesioner post-test mirip dengan pre-test. Pengolahan data dilakukan dengan editing, coding, entri data dan tabulasi data. Sedangkan analisis data menggunakan analisis univariat dan bivariat. Uji statistik yang digunakan adalah menggunakan Wilcoxon cocok uji Pairs. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi elemen dari aplikasi dan SPIP sebelum dan sesudah peningkatan sosialisasi. Ada sebelum dan sesudah pengaruh sosialisasi dengan aplikasi SPIP di

Politeknik Kesehatan Semarang. Sebagai saran kita perlu membuat aplikasi SPIP dan komitmen antara manajer dan karyawan dan perwakilan Politeknik Kesehatan Semarang yang akan menciptakan good governance.

Kata kunci: SPIP, manajer dan karyawan, Politeknik Kesehatan Semarang

1. Pendahuluan

Dalam rangka penguatan tata kelola dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi serta kegiatan di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang perlu mendapat pengawasan secara sistematis agar terkendali, efisien, efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan (controlling) merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan ditetapkannya Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang sebagai institusi Badan Layanan Umum membentuk Satuan Pengawasan Internal (SPI) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pemeriksaan/pengawasan internal di Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan instansi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga akan tercipta tata kelola yang baik. Sebagai upaya untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pengelola dan pegawai di jurusan dan perwakilan jurusan dalam menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada manajemen pengelolaan yang baik di Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang.

Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor : OT.02.03/1/4/03440.1 tanggal 1 Juli 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang, Susunan organisasi

terdiri atas : Direktur, pembantu direktur, senat, Sub.Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi, Sub.Bagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian, Manajemen Representatif (MR), Satuan Pengawas Internal (SPI), Jurusan, Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UP2M), Unit penunjang meliputi Unit Penjaminan Mutu, Unit Informasi dan Teknologi, Unit asrama, Unit Perencanaan Program dan Evaluasi, Unit Laboratorium, Unit Perpustakaan, Unit Swadana, Unit Pengembangan Karier, Unit Bengkel Kerja, Unit Pengembangan Bahasa dan Unit pemeliharaan serta tenaga fungsional. Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan professional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesehatan tertentu. Jurusan dipimpin oleh seorang ketua jurusan yang dipilih antara kelompok dosen sesuai peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab langsung kepada direktur. Jurusan terdiri atas ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua program studi, sub-sub unit penunjang dan kelompok tenaga fungsional. Perwakilan jurusan merupakan unsur jurusan yang melaksanakan pendidikan professional dilaksanakan pada satu atau beberapa program studi, mengkoordinir pengelolaan sumber daya perwakilan jurusan dalam rangka pelaksanaan kegiatan rutin, pengembangan dan memajukan Jurusan sesuai dengan visi dan misi Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang yang dicanangkan.

Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang memiliki 8 (delapan) Jurusan yaitu Keperawatan, Kebidanan, Gizi, Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi, Keperawatan Gigi, Kesehatan Lingkungan, dan Analisis Kesehatan serta

Rekam Medik dan informasi kesehatan. Mempunyai 23 (dua puluh tiga) Program Studi yaitu Prodi D-III Keperawatan Semarang, Purwokerto, Pekalongan, Blora, Magelang dan Prodi D-IV Keperawatan Klinik Semarang dan Keperawatan Jiwa Magelang. Prodi D-III Kebidanan Semarang, Magelang, Purwokerto, Blora dan Prodi D-IV Bidan Pendidik Semarang dan Kebidanan komunitas Magelang.

Prodi D-III Gizi dan Prodi D-IV Gizi Semarang. Prodi D-III TRR Semarang, Purwokerto dan Prodi D-IV Teknik Radiologi Semarang. Prodi D-III Keperawatan Gigi dan Prodi D-IV Keperawatan Gigi Komunitas Semarang. Prodi D-III Kesehatan Lingkungan dan Prodi D-IV Kesehatan Lingkungan Purwokerto. Prodi D-III Analisis Kesehatan Semarang. Prodi D-III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan.

Berdasarkan PP No.60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memiliki lima unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern.

Yang dimaksud dengan lingkungan pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern.. Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawabnya, batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya. Mereka juga berkomitmen untuk mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi. Lingkungan pengendalian yang buruk memberikan kontribusi yang signifikan di dalam kegagalan efektifitas unsur SPIP lainnya. Lingkungan pengendalian yang baik memiliki prasyarat bahwa dalam instansi tersebut terdapat pegawai yang berkompeten, memahami tanggung jawab, memahami batasan kewenangannya,

memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan berkomitmen untuk mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi. Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 pasal 4 mewajibkan pimpinan instansi pemerintah untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan system pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya melalui hal berikut : penegakkan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM, perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

Pengertian resiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Resiko mengacu pada ketidakpastian yaitu kurangnya pengetahuan dalam menjelaskan sesuatu atau hasilnya di masa depan, dengan banyak kemungkinan hasil, sementara resiko adalah ketidakpastian yang kemungkinan hasilnya akan berakibat tidak diinginkan atau mendatangkan kerugian yang signifikan. Meskipun berkonotasi negative, resiko bukan merupakan sesuatu yang harus dihindari melainkan harus di kelola melalui suatu mekanisme yang dinamakan pengelolaan atau pengendalian resiko. Resiko seringkali diungkapkan dalam bentuk suatu kejadian atau peristiwa dan dampak atau konsekuensi yang mengikutinya. Oleh karenanya, resiko diukur dengan mengombinasikan dampak suatu peristiwa dengan kemungkinan kejadiannya. Resiko terdiri dari unsur-unsur kemungkinan kejadian atau peristiwa, dampak atau konsekuensi (jika terjadi, resiko akan membawa akibat atau konsekuensi),

kemungkinan kejadian (risiko masih berupa kemungkinan atau diukur dalam bentuk probabilitas). Ada beberapa kategori risiko tergantung dari sudut pandang yaitu risiko penyebab, risiko akibat, risiko kejadian, risiko jenis risikonya, risiko sumbernya, risiko dari penerima risiko dan risiko tingkat kemungkinan dan dampak risiko, risiko dari kemampuan mengendalikan dan risiko hirarki risiko.

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko, penetapan dan pelaksanaan kebijakan serta prosedur, untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian meliputi bermacam kegiatan yang bersifat detektif dan preventif. Setelah dideteksi adanya penyimpangan atau kelemahan, dilakukan tindakan koreksi untuk menyempurnakan kegiatan pengendalian sehingga diperoleh keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi akan tercapai. Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, serta sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian terjadi di semua tingkat organisasi, kegiatan, unit dan fungsi juga merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan, penerapan serta review kinerja dari instansi pemerintah. Kegiatan pengendalian ditetapkan berdasarkan hasil penilaian risiko dengan mempertimbangkan kecukupan kegiatan pengendalian.

Informasi adalah data yang telah diolah, yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan symbol atau lambing tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja

system pengendalian intern. Dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Pemantauan dilakukan dalam satu periode tertentu, mencakup penilaian desain dan operasi pengendalian dan melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan terhadapnya

2. Metode

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian Kuantitatif dengan metode penelitian Eksperimen semu (Quasi eksperimen) dengan disain Cross Sectional. Disain yang digunakan yaitu One group Pretest - Post test. Sampel adalah Pengelola dan pegawai Jurusan dan perwakilan jurusan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang berjumlah 51 orang. Instrumen yang digunakan adalah kuisisioner. Langkah penelitian yaitu Seluruh sampel berjumlah 51 orang dikumpulkan dalam suatu ruangan dan diberikan pre test berupa kuisisioner tentang pemahaman dan unsur-unsur SPIP. Setelah pre test selesai dilanjutkan dengan sosialisasi tentang SPIP oleh BPKP Prov. Jawa Tengah. Untuk mengetahui hasil pemahaman dan penerapan unsur-unsur SPIP selang 1 bulan kemudian dilakukan post test berupa kuisisioner yang sama dengan pre test. Pengolahan data dilakukan dengan melalui beberapa tahap yaitu editing, coding, entri data dan tabulasi data. Sedangkan analisa data menggunakan analisis univariat dan bivariat dengan uji statistik yang menggunakan wilcoxon match Pairs test.

3. Hasil

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sebelum sosialisasi SPIP

a. Persepsi penerapan SPIP

1) Aspek pemahaman

Tabel 1. Diskripsi aspek pemahaman SPIP sebelum sosialisasi

NO	KATEGORI	N	%
1	Baik	27	52,9%
2	Tidak baik	24	47,1%
	Total	51	100%

2) Aspek desiminasi

Tabel 2. Diskripsi aspek desiminasi SPIP sebelum sosialisasi

NO	KATEGORI	N	%
1	Baik	10	19,6%
2	Tidak baik	41	80,4%
	Total	51	100%

3) Aspek pencapaian tujuan

Tabel 3. Diskripsi aspek pencapaian tujuan SPIP sebelum sosialisasi

NO	KATEGORI	N	%
1	Baik	39	76,5%
2	Tidak baik	12	23,5%
	Total	51	100%

1) Kegiatan pengendalian

Tabel 6. Diskripsi unsur kegiatan pengendalian dalam SPIP sebelum sosialisasi

NO	KATEGORI	N	%
1	Baik	5	9,8%
2	Tidak baik	46	90,2%
	Total	51	100%

2) Informasi dan Komunikasi

Tabel 7. Diskripsi unsur informasi dan Komunikasi dalam SPIP sebelum sosialisasi

NO	KATEGORI	N	%
1	Baik	18	35,3%
2	Tidak baik	33	64,7%
	Total	51	100%

3) Pemantauan dan evaluasi

Tabel 8. Diskripsi unsur pemantauan dan evaluasi dalam SPIP sebelum sosialisasi

NO	KATEGORI	N	%
1	Baik	14	27,5%
2	Tidak baik	37	72,5%
	Total	51	100%

1. Sesudah sosialisasi SPIP

a. Persepsi penerapan SPIP

1) Aspek pemahaman

Tabel 9. Diskripsi aspek pemahaman SPIP sesudah sosialisasi

NO	KATEGORI	N	%
1	Baik	48	94.1%
2	Tidak baik	3	5.9%
	Total	51	100%

2) Aspek desiminasi

Tabel 10. Diskripsi aspek desiminasi SPIP sesudah sosialisasi

NO	KATEGORI	N	%
1	Baik	47	92,2%
2	Tidak baik	4	
	Total	51	100%

3) Aspek pencapaian tujuan

Tabel 11. Diskripsi aspek pencapaian tujuan SPIP sesudah sosialisasi

NO	KATEGORI	N	%
1	Baik	47	7,8%

2	Tidak baik	4	7,8%
	Total	51	100%

a. Unsur-unsur penerapan SPIP

1) Lingkungan pengendalian

Tabel 12. Diskripsi unsur lingkungan pengendalian dalam SPIP sesudah sosialisasi

NO	KATEGORI	N	%
1	Baik	47	92,2%
2	Tidak baik	4	7,8%
	Total	51	100%

2) Penilaian resiko

Tabel 13. Diskripsi unsur penilaian resiko dalam SPIP sesudah sosialisasi

NO	KATEGORI	N	%
1	Baik	48	94,1%
2	Tidak baik	3	5,9%
	Total	51	100%

3) Kegiatan pengendalian

Tabel 14. Diskripsi unsur kegiatan pengendalian dalam SPIP sesudah sosialisasi

NO	KATEGORI	N	%
1	Baik	47	92,2%
2	Tidak baik	4	7,8%
	Total	51	100%

4) Informasi dan Komunikasi

Tabel 15. Diskripsi unsur informasi dan Komunikasi dalam SPIP sesudah sosialisasi

NO	KATEGORI	N	%
1	Baik	34	66,7%
2	Tidak baik	17	33,3%
	Total	51	100%

5) Pemantauan dan evaluasi

6)

Tabel 16. Diskripsi unsur pemantauan dan evaluasi dalam SPIP sesudah sosialisasi

NO	KATEGORI	N	%
1	Baik	36	70,6%
2	Tidak baik	15	29,4%
	Total	51	100%

3. Pengaruh Sosialisasi terhadap Penerapan SPIP

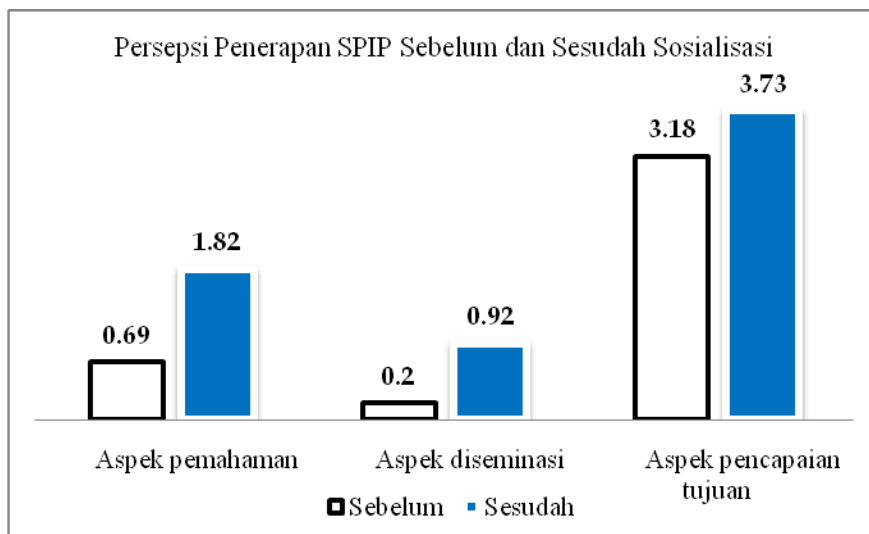
a. Pengaruh Sosialisasi terhadap Persepsi Penerapan SPIP

Tabel 17. Persepsi Penerapan SPIP Sebelum dan Sesudah Sosialisasi

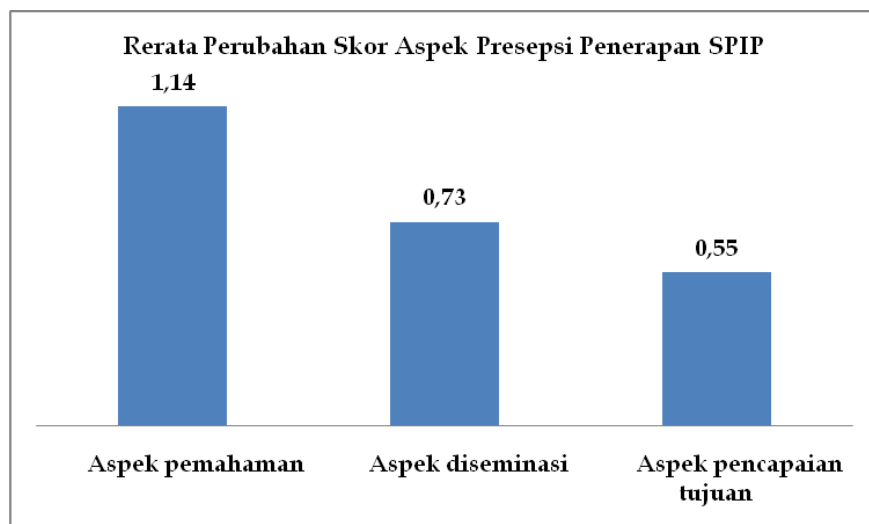
Skor Persepsi Penerapan SPIP	Sebelum	Sesudah	Δ Skor	P
Aspek pemahaman	(n=51) 0,69 \pm 0,74	(n=51) 1,82 \pm 0,52	(n=51) 1,14 \pm 0,92	0,000
Aspek diseminasi	(n=51) 0,20 \pm 0,40	(n=51) 0,92 \pm 2,72	(n=51) 0,73 \pm 0,45	0,000
Aspek pencapaian tujuan	(n=51) 3,18 \pm 1,09	(n=51) 3,73 \pm 0,90	(n=51) 0,55 \pm 1,43	0,010

Wilcoxon Test

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1. dan 2. dibawah ini :



Gambar 1. Grafik Persepsi Penerapan SPIP sebelum dan sesudah sosialisasi



Gambar 2. Grafik Rerata Perubahan Skor Persepsi Penerapan SPIP

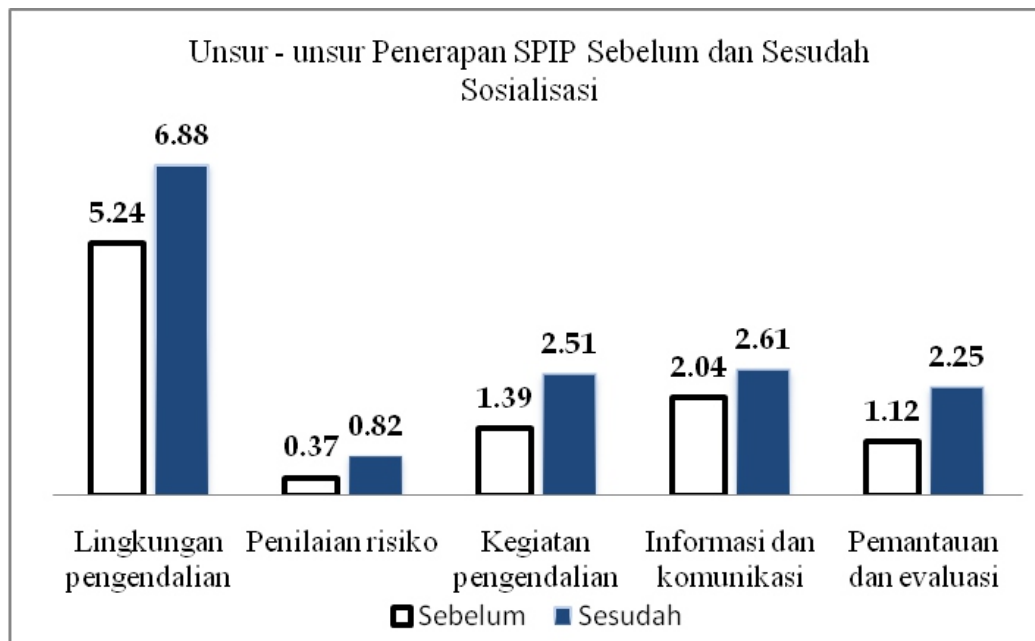
a. Pengaruh Sosialisasi terhadap unsur - unsur SPIP

Tabel 18. Unsur - unsur SPIP Sebelum dan Sesudah Sosialisasi

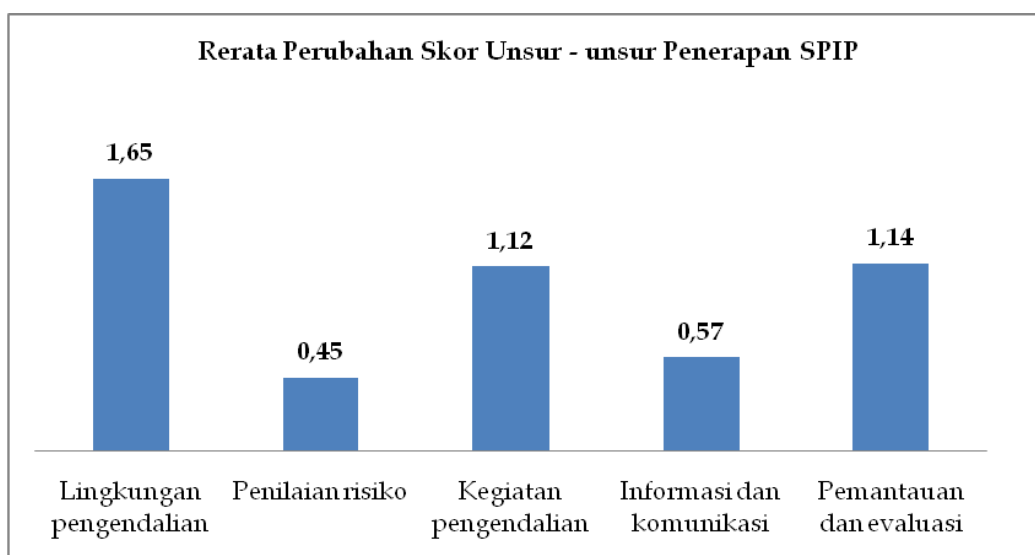
Skor Unsur - unsur SPIP	Sebelum	Sesudah	Δ Skor	P
Lingkungan pengendalian	(n=51) 5,24 \pm 2,02	(n=51) 6,88 \pm 1,60	(n=51) 1,65 \pm 2,68	0,000
Penilaian risiko	(n=51) 0,37 \pm 0,82	(n=51)0,82 \pm 1,24	(n=51) 0,45 \pm 1,36	0,023
Kegiatan pengendalian	(n=51) 1,39 \pm 1,44	(n=51) 2,51 \pm 1,55	(n=51) 1,12 \pm 2,15	0,001
Informasi dan komunikasi	(n=51) 2,04 \pm 1,13	(n=51) 2,61 \pm 0,83	(n=51) 0,57 \pm 1,45	0,010
Pemantauan dan evaluasi	(n=51) 1,12 \pm 1,14	(n=51) 2,25 \pm 1,16	(n=51) 1,14 \pm 1,73	0,000

Wilcoxon Test

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3. dan 4. dibawah ini



Gambar 3. Grafik Unsur –unsur Penerapan SPIP Sebelum dan Sesudah Sosialisasi



Gambar 4. Grafik Rerata Perubahan Skor Unsur-unsur SPIP

Pembahasan

1. Persepsi penerapan SPIP

a. Aspek pemahaman

Deskriptif pemahaman responden /pengelola dan pegawai sebelum Sosialisasi SPIP sebagian besar responden mempunyai pemahaman yang baik tentang SPIP sebanyak 52,9% sedangkan pada kelompok responden yang mempunyai pemahaman yang tidak baik tentang SPIP sebanyak 47,1%. Setelah Sosialisasi menunjukkan perubahan sebagian besar responden mempunyai pemahaman yang baik tentang SPIP sebanyak 94,1% sedangkan pada kelompok responden yang mempunyai pemahaman yang tidak baik tentang SPIP sebanyak 5,9%. Hal ini sesuai dengan teori Notoadmojo (2006) yang mengatakan bahwa pemahaman seseorang di pengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adalah pengetahuan, pendidikan, pengalaman dan lingkungan.

b. Aspek desiminasi

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden belum mendapat desiminasi tentang SPIP sebanyak 80,4% sedangkan pada kelompok responden yang pernah mendapatkan desiminasi tentang SPIP sebanyak 19,6%. Setelah Sosialisasi sebagian besar responden sudah mendapat desiminasi tentang SPIP sebanyak 92,2% sedangkan pada kelompok responden yang tidak pernah mendapatkan desiminasi tentang SPIP sebanyak 7,8%. Hal ini sesuai dengan teori Notoadmojo (2013) bahwa pengetahuan dapat berubah dengan cara melihat, mendengar informasi baik melalui penyuluhan, leaflet, media, dan media elektronik.

c. Aspek pencapaian tujuan

Aspek pencapaian tujuan, sebelum sosialisasi menunjukkan sebagian besar responden sudah memahami tentang tujuan SPIP sebanyak 70,6% sedangkan pada kelompok responden yang belum memahami tentang tujuan SPIP sebanyak 29,4%. Hal ini dimungkinkan karena responden sebelum mendapatkan sosialisasi belum mengerti tentang SPIP

dan hanya sekedar tahu berdasarkan informasi yang berasal dari sumber lain seperti media massa, elektronik dll. Setelah Sosialisasi sebagian besar responden sudah memahami tentang tujuan SPIP sebanyak 92,2% sedangkan pada kelompok responden yang belum memahami tentang tujuan SPIP sebanyak 7,8%.

1. Unsur-unsur penerapan SPIP

a. Lingkungan pengendalian

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditunjukkan sebagian besar responden sudah memahami tentang lingkungan pengendalian sebanyak 76,5% sedangkan pada kelompok responden yang belum memahami tentang lingkungan pengendalian sebanyak 23,5%. Sedangkan sesudah sosialisasi sebagian besar responden sudah memahami tentang lingkungan pengendalian sebanyak 92,2% sedangkan pada kelompok responden yang belum memahami tentang lingkungan pengendalian sebanyak 7,8%. Hal ini sesuai dengan teori Jhon Elim (2009) Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian lingkungan dimana pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten yang memahami tanggung jawabnya.

b. Penilaian resiko

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden sudah memahami tentang penilaian resiko sebanyak 76,5% sedangkan pada kelompok responden yang belum memahami tentang penilaian resiko sebanyak 23,5%. sedangkan sebagian besar responden sudah memahami tentang penilaian resiko sebanyak 94,1% sedangkan pada kelompok responden yang belum memahami tentang penilaian resiko sebanyak 5,9%. Hal ini sesuai dengan teori Nurharyanto (2010), bahwa penilaian resiko merupakan unsur atau komponen sistem pengendalian Intern, dengan sub unsur identifikasi dan

analisis resiko. sedangkan evaluasi resiko adalah proses menilai resiko yang akan di prioritaskan (termasuk mempertimbangkan tingkat resiko yang dapat diterima) dan direspon.

c. Kegiatan pengendalian

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden belum memahami tentang kegiatan pengendalian sebanyak 90,2% sedangkan pada kelompok responden yang sudah memahami tentang kegiatan pengendalian sebanyak 9,8%. sedangkan sesudah sosialisasi sebagian besar responden sudah memahami tentang penilaian resiko sebanyak 94,1% sedangkan pada kelompok responden yang belum memahami tentang penilaian resiko sebanyak 5,9%. Hal ini dikarenakan pengelola sebagian besar pada dasarnya sudah mengerti tentang penilaian resiko, seperti teori penilaian resiko menurut Nurharyanto (2010), bahwa kegiatan diawali dengan identifikasi dan menguraikan semua resiko-resiko potensial yang muncul baik dari faktor internal maupun eksternal. Adanya peringkat resiko yang memerlukan perhatian dari manajemen instansi dan memerlukan tindakan segera. untuk memberikan suatu rekomendasi yang meyakinkan bahwa terdapat resiko-resiko yang menjadi prioritas paling tinggi untuk di kelola dengan efektif.

d. Informasi dan Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian dapat menunjukkan sebagian besar responden belum memahami tentang informasi dan komunikasi sebanyak 64,7% sedangkan pada kelompok responden yang sudah memahami tentang informasi dan komunikasi sebanyak 35,3%. sedangkan setelah sosialisasi sebagian besar responden sudah memahami informasi dan komunikasi 70,6% sedangkan pada kelompok responden yang belum memahami tentang informasi dan komunikasi sebanyak 29,4%. Menurut teori Hassan dkk (2008) komunikasi merupakan

komunikasi yang terjadi antara beberapa pihak di dalam suatu organisasi, antara lain pimpinan dengan bawahan, antar sesama pegawai, atau pimpinan dengan pimpinan unit yang lain dan diharapkan antar bagian dapat melakukan komunikasi dengan baik.

e. Pemantauan dan evaluasi

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden belum memahami tentang pemantauan dan evaluasi sebanyak 72,5% sedangkan pada kelompok responden yang sudah memahami tentang pemantauan dan evaluasi sebanyak 27,5%. Sedangkan sesudah sosialisasi menunjukkan sebagian besar responden sudah memahami tentang pemantauan dan evaluasi sebanyak 70,6% sedangkan pada kelompok responden yang belum memahami tentang pemantauan dan evaluasi sebanyak 29,4%. Hal ini menunjukkan pengelola setiap lini harus konsisten memiliki komitmen yang tinggi dan menaruh perhatian terhadap kegiatan pemantauan evaluasi atas pencapaian misi organisasi. seperti teori Jhon Elim (2009) mengatakan pengendalian yang tidak terpantau dengan baik akan menyebabkan pengendalian yang tidak efektif dalam membantu organisasi mencapai misi institusi pada waktu tertentu. Ini dapat memberi pengaruh buruk bagi system pengendalian, sehingga semua pihak yang berperan perlu menerapkan Sistem Pengendalian Intern pemerintah.

3. Pengaruh Sosialisasi terhadap Penerapan SPIP

Berdasarkan perubahan skor aspek pemahaman sebelum dan sesudah sosialisasi sebesar $1,14 \pm 0,92$, aspek diseminasi sebesar $0,73 \pm 0,45$, dan aspek pencapaian tujuan sebesar $0,55 \pm 1,43$. Perubahan skor aspek pemahaman lebih besar dibanding aspek diseminasi dan pencapaian tujuan dengan nilai p value menunjukkan peningkatan aspek pemahaman responden secara signifikan ($p=0,000 - 0,010$) demikian juga dengan aspek diseminasi dan aspek pencapaian

tujuan. Hal ini sesuai teori Notoadmojo (2006) bahwa pemahaman dipengaruhi oleh pengetahuan, pendidikan, pengalaman seseorang dan didukung oleh lingkungan. Pengaruh sosialisasi SPIP dengan peningkatan desiminasi dan pencapaian tujuan, ini disebabkan karena dengan dilakukan sosialisasi terjadi komunikasi dua arah antara pihak-pihak yang terkait, sehingga akan terjadi saling tukar pengetahuan dalam menerima suatu hal baru sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik.

4. Simpulan dan Saran

Simpulan

Pada persepsi penerapan SPIP sebelum dan sesudah sosialisasi terjadi peningkatan. Pada unsur-unsur SPIP sebelum dan sesudah sosialisasi terjadi peningkatan. Ada pengaruh sebelum dan sesudah Sosialisasi dengan penerapan SPIP di Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang.

Saran

Perlu segera dilakukan penerapan SPIP di Jurusan, Perwakilan Jurusan dan Direktorat Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang

Perlu komitmen bersama antara pengelola dan pegawai dalam penerapan SPIP di Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang sehingga akan tercipta *good governance*.

5. Ucapan Terimakasih

Ucapan banyak terimakasih disampaikan atas kesempatan yang diberikan untuk mendapatkan Dana Risbinakes DIPA Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

6. Daftar Pustaka

BPKP. .2009. Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Jakarta.
Peraturan Pemerintah nomer 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP), Jakarta